

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PALEMBANG

Ahmad Fauzan Alfarishi¹, Sukmini Hartati²

^{1,2}Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

E-mail: alfarishi3@gmail.com, Sukmini_hartati@polsri.ac.id

Abstrak

Pemerintah sedang mengembangkan teknologi di sektor keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung informasi perencanaan keuangan dan aset daerah. Fokus penelitian adalah penerapan SIPD di BPKAD Kota Palembang, dengan subjek penelitian melibatkan BPKAD Kota Palembang, dan informan penelitian terdiri dari kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang akuntansi dan pelaporan. Metode yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, dengan dua sumber data utama yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Palembang terbukti efektif dalam mencapai tujuan, khususnya sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Kata kunci: Implementasi, efektivitas, sistem informasi pembangunan daerah

Abstract

The government is developing technology in the financial sector through the Local Government Information System (SIPD). This study aims to understand the implementation of SIPD in the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Palembang City, as well as evaluate its effectiveness in supporting regional financial and asset planning information. The focus of the research was the application of SIPD in BPKAD Palembang City, with the subject of research involving BPKAD Palembang City, and research informants consisting of the head of the budget sector, the head of the treasury sector, and the accounting and reporting sub-field. The method used is qualitative descriptive data analysis, with two main data sources, namely primary data and secondary data. The results showed that the implementation of SIPD in BPKAD Palembang City proved effective in achieving goals, especially in accordance with the provisions of Permendagri No. 70 of 2019.

Keywords: Implementation, effectiveness, regional development information system

1. PENDAHULUAN

Perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang berubah dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi, telah memberikan dampak yang signifikan pada pelaksanaan pemerintahan dan lingkup pekerjaan secara umum. Perubahan ini juga menciptakan penyesuaian dalam pengaturan sistem pemerintahan daerah, yang termanifestasi melalui dikeluarkannya peraturan baru yang mengatur Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019. Sebelumnya, peraturan terkait adalah Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Kebijakan ini diresmikan pada bulan September 2019, dan sebagai hasilnya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengimplementasikannya.

Dengan diberlakukannya Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang secara otomatis menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, tidak lagi menggunakan aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Mereka kini beralih ke aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Anggaran berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dengan melihat data rekening belanja dalam anggaran belanja pemerintah, dapat diketahui sejauh mana anggaran yang telah disusun mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tugas pemerintah daerah mencakup pengajuan rancangan Peraturan Daerah (Perda), penetapan Perda yang telah disetujui oleh DPRD, dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.

Penggunaan aplikasi berbasis web ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik di pemerintahan, terutama di Kota Palembang. Namun, pelaksanaan program ini tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama serta usaha keras dari setiap instansi yang terlibat. Berdasarkan pengamatan awal, penulis mengidentifikasi beberapa masalah. Sebelumnya, BPKAD Kota Palembang menggunakan SIMDA yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan tidak mengalami kendala. Namun, pada awal tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru, yaitu SIPD. Karena aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, beberapa kendala muncul, terutama di BPKAD Kota Palembang. Beberapa OPD, termasuk BPKAD, menghadapi kesulitan dalam penginputan data di SIPD, yang menyebabkan perbedaan dalam laporan yang dihasilkan, penundaan pergeseran anggaran, hambatan dalam sistem penggajian, dan seringnya error pada jaringan SIPD. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi

Konsep Bureucracy and Policy Implementation (Winarno, dkk., 2007:145) menyatakan bahwa Implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan, memberikan otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat, atau keluaran konkret tertentu. Istilah implementasi mencakup berbagai aktivitas yang mengikuti pernyataan tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Proses implementasi melibatkan serangkaian tindakan atau kegiatan, yang dilakukan oleh berbagai pihak, dengan tujuan memastikan kelancaran pelaksanaan program. Dalam rangka proses kebijakan publik, tahap implementasi merupakan tahap yang penting agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Sebuah kebijakan hasil dari proses politis harus diartikan dan diwujudkan melalui kegiatan dan tindakan dalam proses implementasi. Setelah melalui tahap formulasi kebijakan, implementasi dapat dianggap sebagai pernyataan kebijakan yang terdapat dalam kebijakan yang telah diputuskan untuk dilaksanakan melalui serangkaian langkah konkret (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut konsep implementasi T.B. Smith (Siregar, 2022, dalam Islamy, 2002), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel krusial, yaitu:

1. Kebijakan Ideal (*idealized policy*). Pola interaksi yang dirancang oleh perumus kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang kelompok sasaran agar melaksanakan kebijakan tersebut. Fokus pada strategi interaksi yang direncanakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerimaan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Kelompok Sasaran (*target groups*). Kelompok atau individu yang diharapkan untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan. Strategi interaksi yang efektif dengan kelompok sasaran menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan.
3. Badan – Badan Pelaksana (*implementing organization*). Badan atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Keterlibatan dan komitmen dari organisasi pelaksana menjadi krusial dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan implementasi.
4. Faktor Lingkungan (*inveronmentanl factors*). Unsur-unsur dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman dan adaptasi terhadap faktor-faktor lingkungan ini penting untuk mengidentifikasi kendala potensial dan mengembangkan strategi implementasi yang sesuai dengan konteksnya.

2.2 Efektivitas

Efektivitas sering digunakan sebagai konsep yang berkaitan dengan efektifitas, di mana suatu organisasi berupaya mencapai tujuannya. Efektivitas organisasi dapat terwujud melalui penerapan prinsip-prinsip seperti kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi, dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "efektif" diartikan sebagai kemampuan membawa hasil atau memberikan manfaat. Sementara menurut Handoko (2003:7), efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam pencapaian suatu target, sasaran atau suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Grandis, 2018). Efektivitas mencerminkan sejauh mana sebuah organisasi mampu menjalankan tugas pokoknya atau mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Duncan dan dijelaskan dalam karya Steers (1985), mengidentifikasi tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan adalah upaya menuju kesuksesan kebijakan mencakup serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator pencapaian tujuan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, dengan memperhatikan sejauh mana implementasinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya..
2. Integrasi merupakan evaluasi terhadap kemampuan dan potensi suatu kebijakan, diukur dengan mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengintegrasikan berbagai aspek. Evaluasi integrasi mencakup kegiatan seperti sosialisasi, pembangunan konsensus, komunikasi dengan organisasi lain, dan faktor pendukung lainnya.
3. Adaptasi adalah langkah penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan. Keberhasilan implementasi kebijakan tercermin dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah di lingkungan, maka dapat dianggap bahwa kebijakan tersebut telah berhasil beradaptasi. Oleh karena itu, efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai melalui tingkat adaptasinya terhadap perubahan lingkungan..

2.3 Sistem Informasi

Menurut Gordon B. Davis (1991:91), sistem informasi merupakan suatu mekanisme yang menerima input atau data beserta instruksi, mengolah data sesuai dengan petunjuk tersebut, dan menghasilkan output. Secara umum, definisi Sistem Informasi Pemerintah merujuk pada pengembangan serangkaian sistem yang terdiri dari perangkat keras,

perangkat lunak, dan personel yang bekerja bersama dalam suatu rangkaian proses untuk saling mendukung dalam pengolahan data guna menghasilkan informasi (Nataniel & Hatta, 2009). Di sisi lain, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diartikan sebagai pengelolaan informasi secara terstruktur, berdasarkan kinerja yang mematuhi prinsip efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan memenuhi kebutuhan organisasi di seluruh tingkatan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008).

2.4 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait perencanaan dan analisis pembangunan daerah, serta Profil Pembangunan Daerah. Informasi yang tercakup dalam Pembangunan Daerah minimal mencakup:

1. Data perencanaan pembangunan daerah
2. Analisis dan Profil Pembangunan daerah
3. Informasi perencanaan pembangunan daerah
4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari proses pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah digunakan sebagai panduan dalam menyusun dokumen anggaran daerah, seperti KUA, PPAS, rancangan APBD, hingga menjadi APBD yang diimplementasikan secara berbasis elektronik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menghasilkan data deskriptif, yang nantinya dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diinvestigasi (Moeloeng, 2006). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan data sesuai dengan temuan penelitian yang diungkapkan melalui tulisan dan gambar, bukan melalui angka-angka. Lokasi penelitian adalah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang yang terletak di Komplek Kantor Walikota Jl. Sekanak No.46, 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober hingga Desember 2023. Data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian, yang diajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tujuan penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan dalam penelitian ini, termasuk buku, berita, dan jurnal terkait. Informan atau narasumber penelitian adalah individu yang memiliki informasi terkait objek penelitian (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, informan penelitian terdiri dari ketua bidang anggaran (R1), ketua bidang perbendaharaan (R2), dan sub bidang akuntansi dan pelaporan (R3), yang memiliki peran langsung dalam implementasi dan penggunaan aplikasi SIPD. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Ini melibatkan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumen yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, diikuti oleh reduksi data untuk menyederhanakan dan mentransformasikannya. Data kemudian dianalisis melalui seleksi ketat, penggolongan data ke dalam pola yang lebih luas, penyajian data dengan menggabungkan informasi, dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini

menggunakan metode triangulasi untuk memastikan kredibilitas data. Ini melibatkan pemeriksaan data dengan memanfaatkan sumber yang berbeda untuk memeriksa kebenaran data atau informasi, antara lain dengan menanyakan kepada informan satu dengan informan lainnya. Triangulasi dilakukan sebagai bagian dari pengujian kredibilitas terhadap pertanyaan penelitian, yaitu 1. Bagaimana implementasi SIPD di Kota Palembang dengan menggunakan teori implementasi TB Smith? 2. Bagaimana efektivitas SIPD dalam menunjang informasi perencanaan keuangan dan aset daerah Kota Palembang?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sistem informasi pemerintahan daerah ini memiliki keunggulan karena dapat menampung informasi perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk sejalan dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Harapannya, sistem ini dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif, dan responsif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merujuk pada pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang terintegrasi untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan SIPD, BPKAD Kota Palembang menjalankan serangkaian kegiatan koordinasi yang efektif dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi SIPD di berbagai daerah, sehingga BPKAD dapat mengidentifikasi solusi terbaik untuk diterapkan di tingkat lokal, mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lebih efektif. BPKAD juga mengambil langkah proaktif dengan memanfaatkan pembelajaran dari provinsi atau kota lain yang telah menguasai pengelolaan SIPD lebih awal, baik melalui kunjungan langsung maupun pembelajaran daring, seperti melalui youtube. Untuk memastikan pengendalian dan pemantauan yang berkelanjutan, BPKAD merencanakan jadwal rutin untuk monitoring dan pengendalian SIPD, memastikan operasional sistem berjalan optimal. Selain fokus pada aspek teknis, BPKAD juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kompetensi pegawai dengan menganggarkan kegiatan pelatihan khusus bagi operator SIPD, dengan evaluasi kompetensi yang dilakukan secara berkala. Sebagai langkah mendukung kolaborasi antar operator, BPKAD meningkatkan kualitas jaringan internet dan membentuk grup pesan singkat (WAG) untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien dan kolaboratif, memperkuat sinergi dalam pengelolaan SIPD di lingkungan BPKAD Kota Palembang.

Di BPKAD Kota Palembang, terus diambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas pegawai melalui kegiatan sosialisasi dan pembelajaran, terutama dalam konteks SIPD. BPKAD menyelenggarakan program-program ini untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan SIPD, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Regulasi memegang peranan kunci dalam pelaksanaan SIPD, dan BPKAD telah mengintegrasikan Surat Edaran (SE) dari Kepala BPKAD yang berkaitan dengan implementasi SIPD. SE ini memberikan panduan yang jelas terkait aturan dan prosedur penggunaan SIPD, bukan hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai. Selanjutnya, untuk meningkatkan keterampilan operator SIPD, BPKAD merencanakan program pelatihan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman teknis, memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki keterampilan yang diperlukan

untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam tugas sehari-hari. Pada tingkat operasional, BPKAD juga menjalankan kebijakan rapat rutin setiap minggu sebagai platform penting untuk membahas permasalahan yang muncul dan melakukan diskusi singkat, memfasilitasi pertukaran informasi dan identifikasi solusi kolaboratif.

Pemerintah Kota Palembang menjalankan peran sentralnya dengan aktif mengkoordinasikan 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya, bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan dalam implementasi SIPD. Selain fokus pada koordinasi, badan pelaksana ini juga melakukan intervensi mendalam pada seluruh tahapan perencanaan di OPD, dengan upaya mengintegrasikan proses perencanaan secara efektif. Hal ini bertujuan agar seluruh OPD dapat berkolaborasi secara sinergis untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan. Untuk memastikan kesinambungan integrasi, Badan Pelaksana tidak hanya mengidentifikasi 52 OPD yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa integrasi tersebut berjalan efektif melalui penggunaan grup pesan singkat (WAG) dan rapat rutin sebagai instrumen komunikasi yang sangat diperlukan. WAG memberikan platform interaktif untuk diskusi cepat dan pertukaran informasi, sementara rapat rutin dijadwalkan sebagai wadah formal untuk membahas perkembangan, permasalahan, dan solusi bersama terkait implementasi SIPD. Badan Pelaksana juga menekankan ketepatan waktu dalam penginputan penganggaran dalam SIPD dengan memberikan batas waktu pada setiap OPD. Badan Pelaksana berkoordinasi dengan narasumber di Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelatihan, serta menyediakan fasilitas sekretariat dan ruang rapat kerja sebagai dukungan teknis. Oleh karena itu, Badan Pelaksana berperan sebagai katalisator yang tidak hanya memastikan kesinambungan operasional, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan efektivitas OPD dalam mengelola SIPD.

Faktor lingkungan yang memiliki dampak signifikan dalam penerapan SIPD diidentifikasi melalui keterbatasan akses dan penggunaan aplikasi. Keterbatasan akses yang efektif terhadap aplikasi SIPD dapat menjadi kendala serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan daerah. Karakteristik aplikasi yang bersifat terbatas dan bersifat rahasia juga dapat membatasi sejumlah pihak untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki akses yang memadai dan pemahaman yang cukup terhadap aplikasi SIPD. Selain itu, faktor lingkungan lain yang perlu diperhatikan adalah kelangsungan dan transparansi dalam menetapkan jadwal dan target pencapaian.

Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019, tujuan dari perancangan SIPD adalah menciptakan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan basis elektronik, dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Hasil wawancara penelitian mengenai pelaksanaan SIPD menyoroti kemudahan dalam penyampaian informasi, terutama terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah di Palembang. SIPD mempercepat proses pengolahan data perencanaan dan penganggaran daerah, mengeliminasi kebutuhan penambahan standar harga barang dengan mengklik kode dan menginput secara otomatis. Dalam penyusunan anggaran dan penyampaian informasi, SIPD menjaga keamanan dan mematuhi ketentuan. Kebijakan ini telah menetapkan penggunaan SIPD mulai dari penyusunan anggaran tahun 2021.

2. Integrasi

Dalam implementasi SIPD, diperlukan kesesuaian data antara informasi perencanaan

pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut senantiasa terjaga ketidakselarasannya, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. Hasil wawancara dengan kepala bidang anggaran mengenai koordinasi data antara BPKAD dengan OPD lain dalam konteks pelaksanaan SIPD menyatakan bahwa BPKAD telah berhasil mencapai kesesuaian data terkait SIPD dengan OPD lain, karena penting bahwa informasi yang dipresentasikan memiliki keselarasan yang sempurna. Hal ini juga sesuai dengan regulasi yang dijelaskan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, mulai dari tahap perencanaan daerah hingga analisis informasi pemerintahan lainnya. Jadi, fokus utama adalah mencapai sinkronisasi data.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi aplikasi SIPD di BPKAD Kota Palembang

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi aplikasi SIPD maka peneliti menggunakan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut T.B Smith sebagai acuan. Kebijakan Ideal, sebagaimana dijelaskan oleh TB Smith (1973), menitikberatkan pada pola interaksi yang diprogram oleh perumus kebijakan dengan tujuan mendorong, memengaruhi, dan merangsang kelompok sasaran agar melaksanakan kebijakan tersebut. Fokusnya pada strategi interaksi yang terencana bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung penerimaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan SIPD di BPKAD Kota Palembang diambil mencerminkan prinsip koordinasi dan pembelajaran organisasional., pendekatan yang Kolaborasi aktif dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menegaskan komitmen BPKAD untuk memastikan keselarasan dan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi SIPD di berbagai daerah. Selain itu, pendekatan proaktif dalam pembelajaran dari pengalaman provinsi atau kota lain, serta pemanfaatan sumber daya daring seperti YouTube, menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Langkah-langkah BPKAD juga melibatkan pengendalian dan pemantauan berkelanjutan, investasi dalam pelatihan operator SIPD, evaluasi kompetensi berkala, dan peningkatan infrastruktur jaringan internet serta pembentukan WAG. Ini menunjukkan bahwa BPKAD tidak hanya memperhatikan implementasi teknis SIPD, tetapi juga aspek manusia dan infrastruktur untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan pengelolaan SIPD di tingkat lokal sesuai dengan prinsip-prinsip teori TB Smith.

Dalam implementasi kebijakan di BPKAD Kota Palembang, kelompok sasaran menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan. Menurut teori implementasi TB Smith, kelompok sasaran, yaitu bagian dari policy stakeholders, diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi sesuai dengan yang diinginkan oleh perumus kebijakan. BPKAD secara strategis memperkuat kapabilitas pegawai sebagai kelompok sasaran utama, khususnya dalam pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD). Upaya ini mencerminkan fokus BPKAD pada pemahaman mendalam pegawai terhadap implementasi SIPD, sesuai dengan konsep kelompok sasaran dalam teori TB Smith. Melalui regulasi dan Surat Edaran (SE), BPKAD memberikan panduan yang jelas kepada kelompok sasaran, memastikan kepatuhan aturan, dan menciptakan dasar yang kokoh untuk tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, BPKAD merencanakan program pelatihan khusus untuk operator SIPD, mengikuti konsep pembelajaran organisasional dalam teori TB Smith. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan pemahaman teknis anggota tim, memberikan dukungan kritis dalam implementasi kebijakan. Pendekatan rapat rutin setiap minggu menjadi platform efektif untuk komunikasi dan kolaborasi, memfasilitasi pertukaran informasi dan solusi cepat terhadap

permasalahan yang muncul. Komitmen pada sumber daya finansial yang disusun dengan cermat menunjukkan perhatian BPKAD terhadap kesiapan finansial dalam mendukung kelompok sasaran.

Badan - Badan Pelaksana, dalam konteks implementasi kebijakan di Pemerintah Kota Palembang, memiliki peran sentral yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori implementasi mencakup *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factors*. Badan Pelaksana menjadi kunci dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan SIPD, menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan intervensi dalam implementasi kebijakan. Dengan melakukan koordinasi aktif dengan 52 OPD, Badan Pelaksana memastikan kesinambungan dan keberlanjutan dalam implementasi SIPD, mencerminkan prinsip koordinasi. Selain itu, Badan Pelaksana juga melakukan intervensi mendalam pada tahapan perencanaan di OPD, menciptakan kondisi yang mendukung sinergi di antara OPD sesuai dengan prinsip *idealized policy*. Penggunaan WAG dan rapat rutin sebagai instrumen komunikasi sangat diperlukan, sesuai dengan prinsip komunikasi, untuk memastikan alur informasi yang efektif dan keterlibatan aktif kelompok sasaran.

Faktor Lingkungan mencakup unsur-unsur seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks SIPD, faktor lingkungan memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi (Ishmaturahwa, *et al*, 2022). Pertama, keterbatasan akses dan penggunaan aplikasi SIPD menjadi manifestasi awal dari faktor lingkungan ini. Kesulitan akses efektif menciptakan kendala serius, menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan perspektif Target groups. "Selanjutnya, faktor lingkungan terkait keberlanjutan dan transparansi dalam penetapan jadwal dan target pencapaian memainkan peran kunci, terkait dengan variabel "Invernonmental factors". Dalam lingkungan BPKAD Kota Palembang, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang harmonis mencerminkan keberhasilan dalam mengelola faktor lingkungan. Meskipun mengalami pergantian pemimpin, BPKAD Kota Palembang tetap menjaga keharmonisan dan keseimbangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menandai kepekaan dan profesionalisme BPKAD dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat di Kota Palembang, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.2.2 Efektivitas

Pencapaian tujuan dalam teori efektivitas, khususnya terkait implementasi SIPD berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019, tercermin dalam beberapa aspek yang menunjukkan keberhasilan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pertama, SIPD dirancang untuk menciptakan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik. Keberhasilan ini dapat diukur dari sejauh mana berbagai elemen administrasi pemerintahan daerah dapat berinteraksi dan berkolaborasi melalui platform SIPD, memfasilitasi pelaksanaan tugas dengan lebih efektif dan mengoptimalkan pengolahan data perencanaan dan penganggaran daerah. Kedua, SIPD juga memberikan kontribusi dalam mendorong pelaksanaan pemerintah yang lebih inovatif, cepat, dan kreatif dengan kemudahan akses dan integrasi proses perencanaan serta penyusunan anggaran, memungkinkan responsivitas terhadap perubahan dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan lainnya terlihat dalam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran, menunjukkan efektivitas SIPD dalam memenuhi tujuan Permendagri dengan memberikan efisiensi yang signifikan dalam pengaksesan dan penginputan data serta proses perencanaan dan penganggaran secara lebih efisien. Pencapaian tujuan dalam teori

efektivitas secara keseluruhan diperoleh melalui implementasi berhasil SIPD, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan informasi Pemerintahan Daerah tetapi juga merangsang inovasi, responsivitas, dan efisiensi dalam proses administratif.

Integrasi dalam teori efektivitas, terutama dalam implementasi SIPD, memegang peran krusial dalam menjamin keberhasilan dan kredibilitas sistem. Kesesuaian data antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi keuangan daerah mencerminkan tingkat integrasi data yang terjaga dengan baik. Integrasi data menjadi kunci dalam memastikan keandalan dan akurasi informasi yang disajikan oleh SIPD, yang berperan tidak hanya sebagai alat administrasi tetapi juga sebagai sumber informasi strategis untuk pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah. Komitmen terhadap integrasi informasi, seperti tercermin dalam kesesuaian data antara SIPD dan OPD, menciptakan dasar yang kuat untuk analisis informasi pemerintahan dan memastikan pemahaman yang konsisten terhadap kondisi dan perkembangan daerah (Martini, *et al.*, 2022). Fokus pada sinkronisasi data mencerminkan pemahaman bahwa integrasi tidak hanya tentang konsistensi internal, melainkan juga keterkaitan dan koordinasi antar instansi. Dengan menjaga integrasi data, SIPD menjadi instrumen yang handal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan daerah yang efektif, serta menjadi syarat mutlak untuk membangun kepercayaan stakeholder terhadap informasi yang dihasilkan oleh SIPD, menjadikannya alat yang efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah.

Adaptasi SIPD di BPKAD Kota Palembang mencerminkan langkah-langkah kokoh dalam merespons perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi dan pembelajaran intensif telah membentuk pemahaman mendalam di kalangan pegawai, bukan hanya sebagai pengenalan, tetapi juga untuk membentuk budaya kerja proaktif. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan khusus menunjukkan komitmen BPKAD Palembang untuk tidak hanya memahami konsep SIPD secara umum, tetapi juga menerapkannya secara operasional, memastikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, upaya adaptasi ini tidak hanya menciptakan fondasi yang kuat untuk teknologi SIPD (Sulaiman dkk., 2022), tetapi juga menegaskan komitmen terhadap inovasi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Martini, *et al.*, 2022), menjadi langkah awal penting dalam menghadapi dinamika perubahan.

5. KESIMPULAN

Implementasi SIPD di BPKAD Kota Palembang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip teori implementasi TB Smith dengan baik. Tindakan strategis, seperti penjadwalan rutin monitoring, fokus pada kelompok sasaran (pegawai), dan kerjasama efektif dengan Badan Pelaksana di Pemerintah Kota Palembang, mengindikasikan kesungguhan dan dedikasi dalam mencapai kebijakan yang ideal. Integrasi regulasi dan Surat Edaran sebagai panduan, program pelatihan khusus, dan rapat rutin setiap minggu memperkuat peran BPKAD dalam memastikan pemahaman mendalam dan penerapan pola interaksi yang diinginkan oleh perumus kebijakan. Dengan memperhatikan faktor lingkungan, seperti akses dan penggunaan aplikasi SIPD, keberlanjutan, transparansi, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang harmonis, BPKAD Kota Palembang menunjukkan pendekatan holistik untuk mencapai efektivitas dalam implementasi SIPD.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD di BPKAD Kota Palembang mencerminkan upaya matang dan berkesinambungan untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan keuangan daerah, sesuai dengan teori T.B. Smith. Penerapan SIPD di BPKAD Kota Palembang telah terbukti sangat efektif dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan,

terutama seiring dengan ketentuan Permendagri No. 70 Tahun 2019. Tindakan konkret seperti penjadwalan rutin monitoring, integrasi data antar OPD, dan peningkatan aksesibilitas serta penggunaan SIPD telah berhasil membantu BPKAD mencapai sasaran efektivitas. Selain itu, komitmen yang diperlihatkan terhadap integrasi data mengindikasikan pemahaman mendalam bahwa integrasi bukan hanya tentang konsistensi internal, tetapi juga koordinasi antar instansi, menciptakan dasar yang kokoh untuk analisis informasi pemerintahan daerah. Upaya adaptasi yang tangguh, melalui sosialisasi, pembelajaran intensif, dan peningkatan kompetensi teknis, menandakan bahwa BPKAD tidak hanya melihat implementasi teknologi sebagai tujuan akhir, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, keseluruhan implementasi SIPD di BPKAD Kota Palembang menjadi tonggak penting dalam mewujudkan inovasi dan efisiensi, sesuai dengan prinsip-prinsip teori efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Ahmad Fahmi, and Rahmi Hayati. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat dari Aspek Struktur Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
- Balqis, N., & Zuhrihal, F. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, Vol. 7 (117-121)
- Balqis, N., Zuhrihal, F., & Mauliyanda. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 11 (146-161)
- Fahzura, L., & Najamudin. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2, (7-130)
- Grandis, E. T. (2019). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
- Ishmaturahwa, M., Sulaiman, S., Martini, R., Thoyib, M., & Sari, K. R. (2022, February). Evaluation of Regional Financial Management Based on Local Government Information Systems. In *5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)* (pp. 105-108). Atlantis Press.
- Karundeng, A. B. Kaawoan, J., & Pangemanan, S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, Volume 1 (1-8).
- Nataniel, D., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. 4(1), 47–54.
- Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Martini, R., Karlina, A., & Dwitayanti, Y. (2022, December). Implementation of Government Internal Control System and Organizational Commitment's Impact on Fraud. *In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022)* (pp. 468-471). Atlantis Press.
- Martini, R., Satirah, F. R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., Widyastuti, E., Husin, F., & Saputri, A. A. R. (2022, February). Internal Control System Affects the Quality of Financial Report Information Palembang City Government. *In 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)* (pp. 144-149). Atlantis Press.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publisher
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting And Business Journal*, Vol. 2 (214-223)
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy sciences*, 4(2), 197-209.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulaiman, S., Martini, R., Ishmaturadhwa, M., & Thoyib, M. (2021). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 6(2), 70-76.
- Winarno., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang. *Prosiding PKM-CSR*, Vol. 2 (122-128)